

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK (BUMDES) (Studi kasus BUMDES di Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)

Intan Rachmina Koho dan Yulita Rosmitika Jaya
Universitas Pramita Indonesia/ Fakultas FISIP/ Ilmu Komunikasi
Jl. Kampus Pramita, Binong-Curug, Tangerang, Banten, Indonesia
intanrachmina@gmail.com

diterima 15 Agustus 2022

revisi 01 September 2022

diterbitkan 14 September 2022

Abstrak

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis data model interaktif yang terdiri dari empat (4) alur yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Dengan harapan dapat menggali dan mengumpulkan data secara mendalam guna memperoleh data utama, dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data dinyatakan bahwa peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes belum cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari indicator penelitian yaitu peranan hubungan antar pribadi (*Interpersonal Role*), peranan yang berhubungan informasi (*Informational Role*), dan peranan pembuat keputusan (*Decosional Role*). Selain itu peneliti juga menggunakan indicator penelitian yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Ornizing*), memberi dorongan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes yang baik yaitu: Kepala desa perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain, supaya dalam pengelolaannya BUMDes lebih efektif, Kepala desa harus lebih memperhatikan tentang pembagian dana Desa, Kepala desa diharapkan untuk lebih efektif dalam hal berinteraksi dengan masyarakat, Kepala desa diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai BUMDes kepada masyarakat.

Kata kunci: Peranan Kepala Desa, Pengelolaan BUMDes, Desa Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang

Abstract

(BUMDes) are the village business institutions managed by the community and village government as an effort to strengthen the economy and formed based on the needs and potential of the village? BUMDes works to accommodate the community. The institutional form/ management business entity professionally, but still relies on the original potential of the village. It can make community businesses more productive and effective researched potential problem is how the role of the Village Head carries out the management support and hinders the role. The purpose of the study was to find out how the role of the Village Coconut in the management of BUMdes and find out the factors that supported and hindered the role of the Village Head in the management of Village-Owned research.

The research was conducted using a qualitative research method of interactive data analysis model consisting of four (4) lines, data collection, data presentation, data reduction, and conclusion drawing. so able to explore and collect data in order to obtain the main data, is carried out by conducting observations, interviews, and documentation. Based on the data analysis, it is stated that the role of the Village Head in managing the Village-Owned Enterprises is not yet maximal. This can be seen from the research indicators, namely the role of interpersonal relationships (Interpersonal Role), roles related to information (Informational Role), and the decision makers (Decisional Role). In addition, researchers also use research indicators, namely planning (planning), organizing (Organizing), giving encouragement (Actuating), and controlling (Controlling). Some suggestions that can be proposed that can later increase the role of the Village Head in the good management of Village-Owned Enterprises are: The village head needs to increase cooperation with the community and other institutions so that the management of BUMDES is more effective. The village head must pay more attention to the distribution of village funds. The village head is expected to be more effective in terms of interacting with the community. Village heads are expected to be more active in socializing BUMDes to the community.

Keywords: *The Role of the Village Head, BUMDES Management, Curug Sangereng Village, Kelapa Dua, Tangerang Regency*

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai satuan wilayah politik terkecil dalam pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa diharapkan mampu melakukan perubahan dalam bidang sosial ekonomi dengan menjadi sumber inovasi, pembina, membimbing dan memberikan ide dan gagasan-gagasan pada masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Pada Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi untuk menjalankan

pemerintahannya, maka desa harus mencari dana untuk mengembangkan desanya. Walaupun dalam Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang Desa, menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar Rp. 600.000.000 sampai dengan Rp. 1,2 Milyar, tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut, karena sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus menguras tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal, sehingga desa harus menggali potensi desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk dalam kas desa. Kas Desa atau Keuangan desa didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik agar tercapai pembangunan desa. Hal ini perlu manajemen pengelolaan pendapatan asli desa dan keuangan desa supaya desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah termuat dalam pasal 1 Undang-undang no. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik

Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengertian BUMDes menurut Permendagri no. 39 Tahun 2010 adalah Usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 2 menyebutkan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Peran Kepala Desa sebagai pelayanan masyarakat, pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkatan taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Peran Kepala Desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan koordinasi, evaluasi tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggungjawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Peran desa dalam koordinasi dan dalam hal evaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha BUMDes.

Setiap desa pasti mempunyai caranya masing-masing dalam mengembangkan BUMDes, seperti halnya di desa Curug Sangereng yang memiliki BUMDes yang bisa untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang maju dan berkembang

dibilangan Kecamatan Kelapa Dua, letak wilayah desa Curug Sangereng berada di wilayah pengembang properti ternama yaitu Sumarecon. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya yang dimaksud sisa hasil usaha di sini nantinya akan dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu. Kondisi ideal yang diharapkan terjadi dari BUMDes buka hanya sebagai bentuk lembaga sosial tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup.

Dalam Program Pemberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, antara lain programnya adalah:

1. Pengembangan internet desa. Dalam hal ini Desa Curug Sangereng menyediakan internet di setiap wilayah desa.
2. Mengembangkan usaha mesin fotocopy dan menjual alat tulis kantor dan alat tulis pelajar.
3. Bekerjasama dan memperkenalkan UMKM kepada perusahaan di sekitar Desa Sangereng dengan mensuplai makanan atau catering.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan teori sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, sehingga terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Belum adanya kematangan dalam pengelolaan BUMDes.

Belum adanya kematangan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Curug

Sangereng disebabkan pengaturan organisasi yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha, meskipun kepengurusan sudah dibentuk namun pada implementasinya pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

2. Pandemi Covid 19

Dengan adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan tidak berjalannya program atau tertundanya program kegiatan BUMDes yang mempengaruhi berjalannya program atau kegiatan BUMDes sehingga banyak program yang tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana kerja.

3. Perusahaan-perusahaan di sekitar Desa Sangereng tidak mau diajak kerjasama.

Perusahaan-perusahaan di sekitar Desa Curug Sangereng masih memandang BUMDes sebagai badan satuan terkecil di desa dan masih ada perusahaan-perusahaan yang belum mengenal BUMDes secara baik.

BUMDes sebenarnya sangat diperlukan untuk perkembangan wilayah dan pembangunan desa yang ada di Curug Sangereng. BUMDes ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian desa yang mandiri. BUMDes yang berdiri pada tahun 2017 merupakan produk dari peraturan desa yang diaplikasikan sebagai penunjang pendapatan untuk kemajuan desa, sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga BUMDES dapat menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) yang optimal, yang dihasilkan dibidang jasa dan lainnya serta jenis usaha di bidang apa saja dan pangsa pasarnya juga harus jelas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti lebih jauh peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan karena mengingat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng belum maksimal, hal ini dilakukan guna mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dengan

bantuan yang diberikan kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes

II. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan Teori Peran dari Mintzberg dalam Miftah Thoha (2016), yaitu 1, Peranan hubungan antar pribadi (*Interpersonal Role*), 2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Information Role*), 3. Peranan pembuat keputusan (*Decisional Role*) dan Teori Manajemen dari George R. Terry Mintzberg dalam Thoha Mintzberg (2016) yang menjelaskan 3 peranan yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peranan hubungan antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari perana antar pribadi. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Peranan sebagai tokoh (*Figurhead*) yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

- b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*) dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Melakukan hubungan dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*) disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan rekan sejawat, staf dan orang yang berada diluar organisasinya untuk mendapatkan informasi.
 2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*) peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan sebagai berikut :
 - a. Sebagai *Monitor* peran ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi.
 - b. Sebagai pembagi informasi peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c. Sebagai juru bicara peranan ini dimainkan ketua untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
 3. Peranan pembuat keputusan (*Decisional Role*) dalam peranan ini atasan harus lihat dalam suatu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.
 - a. Peranan sebagai *entrepreneur* peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan dimulai dari aktivitas melihat atau memahami secara teliti persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
 - b. Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*) peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi. Ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya akan bubar, terkena gossip, isu kurang baik, dan sebagainya.
 - c. Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*) adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan kebagian dalam organisasinya, sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu pembekalan tenaga kerja dan reputasi.
 - d. Peranan sebagai *negosiator*, peranan ini meminta kepada pemimpin untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Dari waktu ke waktu organisasi akan membuat pemimpin selalu terlibat dalam kancah negosiasi ini dengan pihak-pihak lain diluar organisasi. Dalam keadaan seperti ini pemimpin bertindak untuk membicarakan segala perkara yang di agendakan dalam negosiasi tersebut. Proses seperti ini meminta pemimpin untuk menyusun strategi yang menguntungkan organisasinya.

Pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa

yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Peneliti akan membahas permasalahan ini dengan menambahkan menggunakan Teori Fungsi Manajemen dari George R. Terry, Menurut Terry fungsi manajemen ada 4 (empat) yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan) sampai pada proses terwujudnya tujuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Curug Sangereng.

Dilihat dari permasalahan yang ada dan dilihat dari teori peran (*Interpersonal Role*) maka Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber dan Key Informan, dapat diketahui adanya anggapan yang berbeda antara masing-masing narasumber mengenai peran Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BUMDes, sehingga peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BUMDes karena Kepala Desa di BUMDes sebagai pengawas, kurang sosialisasi, tidak adanya waktu untuk mendatangi masyarakat secara keseluruhan sehingga diambil perwakilannya saja.

Dimensi kedua peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), Dari tiga indikator dari dimensi informasi peneliti menganalisa peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng Kabupaten Tangerang cukup baik, karena Kepala Desa selalu menyampaikan informasi-informasi secara jelas kepada masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat secara langsung atau dengan melakukan rapat dengan seluruh pengurus desa yang nantinya akan disampaikan kembali ke masyarakat.

Dimensi ketiga peranan pembuat keputusan (*Decisional Role*). Dapat

disimpulkan bahwa peran Kepala Desa kurang maksimal dikarenakan kurang meratanya dalam hal pembagian sumber dana karena yang mendapatkan sumber dana di desa hanya masyarakat yang itu-itu saja.

Selain itu peneliti juga menggunakan fungsi pengelolaan yang dilihat dari fungsi perencanaan (*Planning*), berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: perencanaan dan tujuan yang dilakukan Kepala desa dalam meningkatkan BUMDes di Desa Curug Sangereng selain itu BUMDes ini akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilihat dari potensi desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan sumber daya masyarakat baik dibidang pekerjaan maupun pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari fungsi pengorganisasian (*Organizing*) dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng ini masih belum maksimal karena masih ada masyarakat yang belum paham mengenai apa itu BUMDes dan pengelolaannya, serta tanggapan Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa hanya ada sekitar 60 % masyarakat yang paham mengenai BUMDes dan berperan aktif dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu masih ada tanggapan masyarakat yang mengungkapkan bahwa program yang dibentuk dan sedang berjalan ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Karena hanya 50% saja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Curug Sangereng.

Dilihat dari fungsi pemberian dorongan (*Actuating*) dapat disimpulkan bahwa pemberian dorongan atau *Actuating* dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng ini dilihat dari peran mereka dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan pengelolaan BUMDES. Sedangkan untuk hasil yang didapatkan selama program BUMDes ini berjalan masih belum maksimal, karena terkendala oleh beberapa faktor yakni menyangkut dengan masalah pemasaran atau promosi dan kerjasama yang mengakibatkan hasil yang didapat belum sesuai dengan program BUMDes yang dijalankan.

Dilihat dari fungsi pengawasan (Controlling) dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng ini yaitu dengan cara mengontrol program kerja yang sedang berjalan, selain itu Kepala Desa mengatakan bahwa yang terlibat dalam pengawasan ini bukan hanya Kepala Desa tapi juga masyarakat dan pengurus BUMDes agar pengelolaan BUMDes ini lebih transparan. Selain itu, Kepala Desa juga melakukan musyawarah dalam meningkatkan pengawasan BUMDes. Sedangkan sumber dana BUMDes di Desa Curug Sangereng berasal dari Pemerintah Kabupaten dan juga dari anggaran dana desa yang digunakan untuk kelengkapan usaha.

3.2 Pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Curug Sangereng.

Kontribusi khusus dalam pengelolaan BUMDes membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes. Selain masyarakat Kepala Desa dan para pengurus BUMDes juga terlibat langsung dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas program usaha yang dijalankan. Dibutuhkan kerjasama serta komunikasi yang baik sehingga dalam pengelolaannya program usaha yang sudah dijalankan ini dapat meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli. Namun dalam implementasinya, masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes hal ini disebabkan oleh dana yang didistribusikan desa masih kurang merata sehingga masih ada masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan BUMDes

3.3 Hasil yang dicapai dalam pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Curug Sangereng sedang dalam tahap pengelolaan lebih lanjut yang mana dari tiga program usaha yang sudah dijalankan terpaksa harus berhenti karena terkendala masalah pemasaran atau promosi dan wabah covid 19. Sehingga dalam pelaksanaan hanya ada satu program usaha yang dijalankan.

Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat desa yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka dapat diidentifikasi salah satu peran BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, dan masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes di Desa Curug Sangereng tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Curug Sangereng. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakatnya seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.

BUMDes dalam pengelolaannya harus juga dilakukan pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus BUMDes sehingga dalam pelaksanaannya baik Kepala Desa maupun masyarakat dapat menjalankan kembali program usaha yang tadinya sudah tidak berjalan sehingga dapat meningkatkan pendapat asli desa.

3.4 Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian bahwa faktor yang menghambat pengelolaan BUMDes adalah kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat selain itu masalah pemasaran ketika produk sudah tersedia, para pengurus dan masyarakat terkendala dalam hal pemasaran. Kepala Desa juga menegaskan faktor yang menghambat BUMDes sendiri adalah masalah kerjasama. Perusahaan yang tadinya menjalin kerjasama dengan Desa Curug Sangereng dalam mensuplai catering makanan kini sudah tidak bekerjasama lagi. Faktor lain yang menghambat pengelolaan BUMDes adalah Pandemi Covid 19 yang menyebabkan seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan aktivitas dan pelayanan

masyarakat terpaksa dibatasi atau diberhentikan untuk sementara waktu sehingga berdampak pada kondisi perekonomian pelayanan, dan kehidupan sosial masyarakat.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng yaitu masyarakat karena masyarakat merupakan pelaku utama dalam menjalankan usaha BUMDes selain itu masyarakat juga merupakan penyumbang dan dalam menjalankan BUMDes ini selain itu Kepala Desa sebagai penanggung jawab BUMDes serta pra pengurus desa sebagai pendukung dalam memberikan musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes di Desa Curug Sangereng menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)

IV. KESIMPULAN

Peran Kepala Desa Curug Sangereng perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain, supaya dalam pengelolaannya BUMDes lebih efektif. Selain itu peran dari Kepala Desa sebagai pelayan masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya taraf kehidupan masyarakat dalam bidang perekonomian.

Kepala Desa diharapkan untuk lebih efektif dalam hal berinteraksi dengan masyarakat baik itu menyangkut BUMDes maupun urusan-urusan yang ada di desa sehingga dalam pengelolaannya BUMDes di Desa Curug Sangereng semakin berkembang dan menjadi daya tarik bagi perusahaan di sekitar desa untuk kembali menjalin kerjasama dengan BUMDes di Desa Curug Sangereng

Kepala Desa diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan musyawarah

mengenai BUMDes kepada masyarakat dalam hal pemasaran atau promosi sehingga masyarakat tergerak dan berpartisipasi dalam melakukan promosi tentang program usaha BUMDes di Desa Curug Sangereng

V. DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta

Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dan Analitis.

Mudrajat, Kuncoro.2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga

Mujiono. 2016. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggerahan Kecamatan Kranggran

Thoah, Miftah, 2015, Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta: Rajawali Pers

Terry, George R. 2006. Prinsip-prinsip Manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1785-1796

Valentine Queen Thintary dan Aish Widi Lestari. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, Vol.5, No 2 Tahun 2016.

Yulius Gono Ate. *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Jurnal Academia.edu*. Tahun 2019.